

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) DALAM PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

Ulfatul Makwa¹, Nurlaila², Laylan Syafina³

Email: makwaulfatul@gmail.com¹, nurlaila@uinsu.ac.id², laylansyafina@uinsu.ac.id³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan^{1,2,3}

Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Kompetensi, Pengetahuan dan Rules Procedures and Policies (RPPs) secara parsial dan simultan terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada pengawasan keuangan daerah. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 30 Anggota dewan DPRD Provinsi Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dan di analisis dengan SPSS versi 22. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan secara parsial masing-masing variabel kompetensi dan pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD sedangkan Rules Procedures and Policies (RPPs) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD. Berdasarkan hasil uji secara simultan menerangkan bahwa kompetensi, pengetahuan dan Rules Procedures and Policies (RPPs) berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD.

Kata Kunci: Kompetensi, Pengetahuan, Rules Procedures and Policies (RPPs), Kinerja anggota DPRD

Abstract: The purpose of this research was to partially and simultaneously examine the effect of Competence, Knowledge and Rules Procedures and Policies (RPPs) on the performance of members of the Regional House of Representatives (DPRD) in regional financial supervision. Determination of the sample using purposive sampling with a total sample of 30 members of the DPRD North Sumatra Province. Data was collected by distributing questionnaires and analyzed with SPSS version 22. Based on the results of the study, partially each competency and knowledge variable had no effect on the performance of DPRD members while the Rules Procedures and Policies (RPPs) had a negative and significant effect on the performance of DPRD members. . Based on the results of the simultaneous test, it is explained that competence, knowledge and Rules Procedures and Policies (RPPs) have a significant and significant effect on the performance of DPRD members.

Keywords: Competence, Knowledge, Rules Procedures and Policies (RPPs), Performance of DPRD member

PENDAHULUAN

Masalah keuangan serta anggaran daerah merupakan salah satu objek terpenting dalam pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu institusi yang paling mempunyai posisi dan peran strategis dengan pengawasan keuangan daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Oleh karena itu, sangat dibutuhkan peran anggota DPRD yang dalam mengawasi kebijakan keuangan yang hemat, efisien, efektif, transparan serta akuntabel. Salah satu aspek pengawasan ialah pelaksanaan pemeriksaan yang bertujuan agar dikemudian hari tidak ditemukannya adanya penyimpangan atau hambatan dalam pelaksanaannya (Sutedi, 2012).

Dimana dalam pengawasan tersebut harus memiliki lembaga eksekutif yang kompeten dalam menjalankan tugasnya, memiliki pengetahuan tentang anggaran dan memahami *Rules Procedures and Policies* (RPPs) tentang keuangan daerah sampai anggaran itu dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karenanya, jika semua itu tidak ada pada anggota dewan itu sendiri besar kemungkinan akan mempengaruhi kinerja yang dihasilkan oleh anggota dewan itu sendiri.

Salah satu fenomena yang terjadi pada tahun belakangan ini, terdapat permasalahan yang terjadi pada anggota DPRD Sumut terlibat kasus suap mantan Gubernur Gatot Pujo Nugroho yang melibatkan 14 orang menjadi tersangka sebab diduga memperoleh hadiah yang berasal dari Gatot Pujo Nugroho terkait :

- a. Persetujuan Laporan
Pertanggungjawaban Pemprov

tahun anggaran 2012-2014 oleh DPRD Sumut.

- b. Persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provsu tahun anggaran 2013 dan 2014 oleh DPRD Provinsi Sumut.
- c. Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provsu tahun anggaran 2014 dan 2015 oleh DPRD Provinsi Sumut.
- d. Penolakan Penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumut ditahun 2015.

Hal ini bertentangan dengan salah satu RPPs yang dimaksud dalam penulisan ini dimana PP No 13 Tahun 2019 pasal 3 yang menyatakan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (RLPPD) dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD) disusun berdasarkan prinsip : Transparansi, Akuntabilitas, Akurasi dan Objektif. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan APBD tidak berdasarkan undang-undang yang berlaku (Yuni, 2017).

Berdasarkan salah satu fenomena yang terjadi pada anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara penulis tertarik buat meneliti lebih lanjut buat melihat adanya efek antara Kompetensi, Pengetahuan dan RPPs terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Metode kuantitatif, ialah metode yang memakai angka-angka dan dianalisis secara statistik. Kemudian dilakukan uji kualitas data, uji normalitas dan uji hipotesis dengan memakai SPSS versi 22.

Penelitian kuantitatif memiliki tujuan guna memberikan korelasi antara variabel, menguji teori, serta mencari generalisasi yang memiliki nilai prediktif. Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Tujuan penelitian asosiatif ialah guna mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih (Zulfikar, 2016).

Penelitian ini memakai data primer, yang artinya data dalam penelitian ini bersumber dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan tujuan guna menjawab pertanyaan penelitian. Dengan sumber perolehan data melalui kuesioner (Sugiono, 2016). Lewat memberikan sejumlah pertanyaan atau pernyataan tertulis pada responden untuk dijawab.

Wawancara yang digunakan lebih tepatnya jika responden kurang jelas terkait pertanyaan yang dirancang oleh peneliti (Salam, 2015). Serta dokumentasi, teknik yang dilakukan dengan mengumpulkan dari website serta menganalisis sejumlah dokumen yang terkait dengan problem penelitian yakni berupa sejarah DPRD Sumut, Jumlah anggota dewan dan hal- yang berkaitan (Sudaryono, 2017).

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang

berjumlah 100 orang. Teknik pengambilan sampel yang dipakai pada penelitian ini memakai teknik *purposive sampling* yang berdasarkan pertimbangan (*judgment sampling*) (Ikhsan, 2014) sehingga terkumpul data pada penelitian ini sebanyak 30 responden.

PEMBAHASAN

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Sesuai hasil uji validitas data memberikan bahwa masing-masing variabel yaitu : kompetensi, pengetahuan dan *Rules Proceduress and Policies* (RPPs) terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan Keuangan daerah memiliki nilai r hitung $>$ r tabel (Ghazali, 2018), ini terlihat hasil koefisien korelasi berkisar antara $0,440 - 0,923 > 0,361$ sehingga kuesioner yang digunakan dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* untuk masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Hasil
Kinerja Anggota Dewan (Y)	0.752	Reliabel
Kompetensi (X1)	0.775	Reliabel
Pengetahuan (X2)	0.756	Reliabel
RPPS(X3)	0.802	Reliabel

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *cronbach's*

alpha berada di atas 0,6. Dengan demikian hasil uji reabilitas terhadap keseluruhan variabel dikatakan reliabel (Siregar, 2016), sehingga bisa disimpulkan bahwa kuesioner yang dijadikan sebagai alat ukur pada penelitian ini layak buat dipergunakan pada pengujian selanjutnya.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas dengan uji statistik *Kolmogorov Smirnov Test* ialah Suatu data dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan > 0,05 (Priyanto, 2012).

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.41734344
Most Extreme Differences	Absolute	.099
	Positive	.099
	Negative	-.078
Test Statistic		.099
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Dari hasil uji normalitas diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 yang jauh lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang diuji dalam penelitian ini berdistribusi secara normal diantara masing-masing variabel.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dapat dilihat

dengan menganalisis nilai *Tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Pedoman keputusan berdasarkan nilai *VIF (Variance Inflation Factor)* ialah Jika nilai *tolerance* > 0,10 dan *VIF* < 10,00 maka artinya tidak terjadi multikolinieritas dalam model regresi.

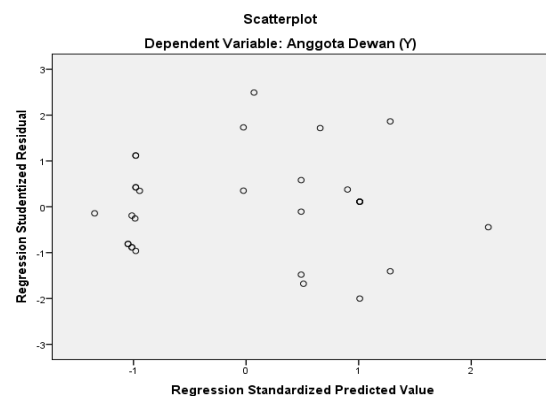
Tabel 3 Hasil Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Kompetensi (X1)	.708	1.413
Pengetahuan (X2)	.878	1.139
RPPS (X3)	.663	1.509

Dari hasil uji multikolinieritas diatas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* dari ketiga variabel > 0,10 dan nilai *VIF* < 10,0 maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak mengandung gejala multikolinieritas diantara masing-masing variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *Scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 1 Hasil Uji Multikolinieritas

Berdasarkan gambar 1 hasil uji

heteroskedastisitas dapat dilihat bahwa tidak terdapat pola yang begitu jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis

Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Untuk pengujian koefisien determinasi menggunakan *Adjusted R Square* dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.916 ^a	.840	1.497

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.821. Hal ini berarti variabel independen Kompetensi, Pengetahuan, RPPs bisa menjelaskan variabel dependen (Kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah sebanyak 82,1% serta sisanya 17,9% ditentukan oleh faktor lain.

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Dalam uji parsial maka dicari lebih dahulu nilai t tabel dengan $df = n - k$ (n adalah total observasi dan k adalah jumlah variabel bebas dan terikat) maka $df = 30 - 4 = 26$ dengan nilai probabilitas yang digunakan sebesar 0,05 (5%) maka didapatlah nilai t_{tabel} dalam penelitian ini sebesar 2,055. Kemudian selanjutnya dicari nilai t hitung sebagai berikut:

Tabel 5 Hasil Uji Parsial

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		T	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	49.051	4.035			12.157	.000
Kompetensi	-.092	.048	-.178		-1.903	.068
Pengetahuan	.111	.082	.114		1.360	.185

Berdasarkan hasil uji t pada tabel diatas maka dapat disimpulkan:

1. Sesuai hasil pengujian secara parsial untuk variabel kompetensi diperoleh nilai t hitung $< t_{tabel}$ yaitu $(-1,903) < (2,055)$ dengan tingkat signifikansi $(0,068) > (0,05)$ sehingga bisa dinyatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Sesuai hasil pengujian secara parsial untuk variabel pengetahuan diperoleh nilai t hitung $< t_{tabel}$ yaitu $(1,360) < (2,055)$ dengan tingkat signifikansi $(0,185) > (0,05)$ sehingga bisa diartikan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD pada pengawasan keuangan daerah.
3. Sesuai hasil pengujian secara parsial untuk variabel *rules proceduress and policies* (RPPs) diperoleh nilai t hitung $> t_{tabel}$ yaitu $(-8,115) > (2,055)$ dengan taraf signifikansi $(0,000) < (0,05)$ sehingga bisa dikatakan bahwa *Rules Proceduress and Policies* (RPPs) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.

Uji Statistik F (Uji Signifikan Simultan)

Dalam uji simultan maka dicari terlebih dahulu nilai F tabel melalui $df = n - k - 1$ (n adalah total observasi dan k adalah jumlah variabel bebas) maka $df = 30 - 3 - 1 = 26$ dengan nilai probabilitas yang digunakan sebesar 0,05 (5%) maka didapatlah nilai F tabel dalam penelitian ini sebesar 2,975.

Tabel 6 Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of		Mean	F	Sig.
	Squares	Df	Square		
1 Regression	305.110	3	101.703	45.390	.000 ^b
Residual	58.257	26	2.241		
Total	363.367	29			

Hasil dari pengujian data, diperoleh bahwa nilai F hitung $>$ F tabel yaitu sebesar $45,39 > 2,975$ dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$, maka kompetensi, pengetahuan, dan RPPS secara serentak berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja anggota dewan dalam pengawasan keuangan daerah.

KESIMPULAN

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $<$ t tabel yaitu $(-1,903) < (2,055)$ dengan tingkat signifikansi $(0,068) > (0,05)$. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sihardo, 2018) yang dilakukan pada lingkungan SKPD Kabupaten Dairi serta (Aswandi, 2018) yang dilakukan di lingkungan pada Organisasi pada Kota Padang yg mengatakan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
2. Hasil penelitian menerangkan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $<$ t tabel yaitu $(1,360) < (2,055)$ dengan tingkat signifikansi $(0,185) > (0,05)$. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Choyrun Nisa, 2016) yang melakukan penelitian pada DPRD Kabupaten Banyuwangi dan penelitian yg dilakukan oleh (Sari, 2016) yang melakukan penelitian pada DPRD Kabupaten Solok yang mengatakan bahwa pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah.
3. Hasil penelitian membuktikan bahwa *Rules Procedures and Policies* (RPPs) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $(-8,115) > (2,055)$ dengan taraf signifikansi $(0,000) < (0,05)$. Hal ini sesuai dengan teori yang dilakukan pada penelitian (Dewi, 2011) dan (Diana, 2017), pada penelitiannya menjelaskan bahwa hal ini ditimbulkan oleh semakin faham anggota dewan terhadap RPPs maka anggota dewan tersebut akan semakin kapabel pada melakukan pengawasan keuangan daerah (APBD).
4. Sesuai hasil penelitian secara simultan menerangkan bahwa Kompetensi, Pengetahuan dan *Rules Procedures and Policies* (RPPs) berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah. Hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung $>$ F tabel yaitu sebesar $45,39 > 2,975$ dan nilai Sig. $0,000 < 0,05$.

SARAN

Berdasarkan hasil di atas, maka dapat disarankan beberapa hal berikut :

1. Agar DPRD Provinsi Sumatera Utara meningkatkan kompetensi dan pengetahuan anggota dewan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) tentang proses dimulainya penyusunan APBD hingga APBD dipertanggungjawabkan.
2. Dalam penelitian ini peneliti memiliki banyak keterbatasan waktu dan jumlah responden dimana sampel penelitian yang diteliti dalam penelitian ini hanya 30 anggota dewan dari 100 anggota dewan yang ada sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas jumlah anggota dewan yang diambil sehingga hasil yang didapatkan akan lebih mendalam dan komperenshif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Ikhsan, Arfan, 2014, Metodologi Penelitian Bisnis untuk akuntansi dan manajemen, Bandung: Citapustaka Media.
- Ghazali, Imam 2018, Aplikasi Analisis Multivariate, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- Priyanto, Dewi, 2012, Belajar Cepat olah data statistik dengan SPSS, Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Siregar, Syofiyon, 2016, Statistika Deskriptif untuk penelitian, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryono, 2017, Metodologi Penelitian, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sugiono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta.
- Sutedi, Adrian, 2012, Hukum Keuangan Negara, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulfikar, 2016, Pengantar Pasar Modal dengan Pendekatan Statistik, Yogyakarta: Depublish.

Jurnal:

- Aswandi, Wahyu. "Pengaruh Kompetensi SDM, Pemanfaatan Teknologi Informasi Akuntansi dan Pengawasan terhadap Kualitas Laporan keuangan sektor publik(Studi Empiris pada organisasi nirlaba di kota padang)", *Jurnal Universitas Negeri Padang*, No. 01, Vol. 06 (Januari 2018).
- Dewi, Indah Mustika. "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam

- pengawasan keuangan daerah(APBD)", *Jurnal Universitas Diponegoro*, No. 05, Vol. 01 (Mei 2011).
- Diana, Septi. "Analisis Fakto-faktor yang mempengaruhi kapabilitas anggota DPRD dalam pengawasan keuangan daerah(APBD) (Studi pada Kabupaten Pringsewu)", *Jurnal Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya*, No. 10, Vol. 01 (Oktober 2019).
- Nisa, Choyrun. "Pengaruh *Personal Background* dan pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap pengawasan keuangan daerah (APBD)(Studi Empiris terhadap DPRD Kabupaten Banyuwangi)", *Jurnal Universitas Jember*, No. 01, Vol. 08 (Januari 2019).
- Sari, Dwiva Ulan. "Pengaruh *Personal Background, Political Background* dan Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran terhadap peran DPRD dalam pengawasan keuangan daerah (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Solok)", *Jurnal Universitas Negeri Padang*, No. 01, Vol. 04 (Januari, 2016).
- Sihardo, Jeremia. "Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian internal, penerapan standart akuntansi pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kulaitass laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Kasus pada SKPD Kabupaten Dairi)", *Jurnal Universitas Sumatera Utara*, No.03, Vol. 01 (Maret 2019).